

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2016 OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disusun Oleh :

NAMA	: EKO MARDIYONO
NPM	: 1861001066
JURUSAN	: ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

2020

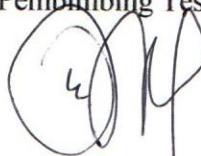
**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Eko Mardiyono
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001066
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan
Judul Tugas Akhir Tesis : Implementasi Kebijakan Penelitian
dan Pengkajian Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2016 oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis



Dr. Edy Sutrisno, M.Si

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Eko Mardiyono
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001066
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan
Judul Tugas Akhir Tesis : Implementasi Kebijakan Penelitian
dan Pengkajian Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2016 oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Telah mempertahankan Tesis di hadapan Panitia Penguji Tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN, Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juli 2020
Pukul : 17.00 - 18.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Tesis:

Ketua Sidang : Dr. Hamka, MA

Sekretaris : Dr. Subandi, MM

Anggota : Dr. Asropi, M.Si

Pembimbing Tugas : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Akhir/Tesis



Hamka
Subandi
Asropi
Edy Sutrisno

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Eko Mardiyono
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001066
Program studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah Saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil Plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada dipaksakan.

Jakarta,

Agustus 2020



Eko Mardiyono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat dan karuni-Nya, telah memberikan kesehatan kepada Saya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Adapun judul tesis Saya adalah “Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengkajian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri”, dimana tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Terapan Administrasi Publik (MTr.AP) pada Politeknik STIA-LAN Jakarta. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Edy Sutrisno, M.Si., selaku Pembimbing Tesis yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, mengkoreksi, dan memberi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. Horas Maurits Pandjaitan, M.Ec.Dev selaku Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
4. Bapak M. Noval, ST, selaku Kepala Bagian, Bapak Drs. Gatot Tri Laksono, M.Pd, selaku Kepala Bidang, Bapak Agung Wijaya, SE, M.Si, selaku Kepala Bidang, Bapak David J. Simanungkalit, S.STP selaku Kepala Subbagian, Ibu Elisabet E.P, S.Pi selaku Kepala Subbagian, Ibu Nuril Indah selaku Kepala Subbidang, Bapak Imam Radiano, A.S.P., S.T., M.M selaku Peneliti dan Ibu Dyah Kusuma Wardhani, S.Sos selaku Peneliti,
5. Para Dosen, staf yang telah banyak memberikan ilmu dan dukungan dan Civitas Politeknik STIA-LAN Jakarta, yang tidak dapat satu persatu Saya sebutkan yang mendukung Penulis selama menimba ilmu, terutama kepada Bapak Fernando S.P yang telah mentransfer Ilmu Pengetahuannya.

6. Kepada Istri Tercinta Made Yuli Asriana, dan anak kami Eriana Ashoka Emeraldhea, Ekmashauqi Prawira Mardiyono, serta Ibu Saya Darminah, dan saya khususkan kepada ayah saya alm. Sunarno yang telah berpulang kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta seluruh saudara yang tidak dapat satu persatu Saya sebutkan.
7. Rekan-rekan ASN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, seperti adagium yang mengatakan bahwa “tidak ada gading yang tidak retak” begitu pula dengan tesis ini, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini dapat memberikan setitik pengetahuan dan khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara.

Hormat Saya,

Eko Mardiyono

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA**

ABSTRAK

EKO MARDIYONO, 1861001066

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2016 OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

118 halaman, 5 bab, xiv, 2 tabel, 12 gambar, 7 Lampiran

Daftar pustaka 23 buku dan peraturan, 3 artikel, lain-lain (2008-2018)

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan yang diterapkan dalam penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya yang dilakukan pada pusat litbang dilingkungan Badan Litbang Kemendagri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Merilee S, Grindle, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila ada kemampuan/kapasitas dalam implementasinya (*Capacity of Implementability*) yang dipengaruhi oleh 2 Aspek yaitu Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Aspek Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*).

Pendekatan penelitian Implementasi kebijakan Penelitian dan Pengkajian menggunakan pendekatan rancangan penelitian kualitatif, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan karena dapat membantu menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian pada Badan Litbang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Adapun Implementasi penelitian dan pengkajian yang ditetapkan oleh Badan Litbang Kemendagri melalui regulasi yang berbentuk Permendagri 17/2016 pada dasarnya bisa mengakomodir seluruh kegiatan penelitian dan pengkajian, baik dasar penentuan judul dari suatu penelitian dan pengkajian serta sampai dengan penyusunan dan pelaporan akhir dari hasil kegiatan penelitian dan pengkajian tersebut. Tetapi dengan berjalanannya waktu atau bisa dikatakan dalam segi implementasi, terdapat kekurangan atau ketidaktepatan dasar kebijakan atau aturan yang dianggap para stakeholder justru menyusahkan para stakeholder tersebut dalam pengimplementasiannya.

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian tersebut sebagai proses administrasi dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*) terkait implementasi penelitian dan pengkajian yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang positif (baik).

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian tersebut sebagai proses politik dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang negatif (buruk).

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA**

ABSTRACT

EKO MARDIYONO, 1861001066

IMPLEMENTATION OF RESEARCH AND ASSESSMENT POLICY BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NO. 17 YEAR 2016 BY THE MINISTER OF RESEARCH AND DEVELOPMENT MINISTRY IN THE STATE
118 hal, 5 bab, xiv, 2 tabel, 12 gambar, 7 Lampiran

Daftar pustaka 23 buku dan peraturan, 3 artikel, lain-lain (2008-2018)

This study aims to explain the aspects of the policies applied in research and studies carried out by the Research and Development Agency, especially those carried out at R&D centers within the Ministry of Home Affairs Research and Development Agency. The approach used is an approach based on Merilee S. Grindle, which states that policy implementation can be carried out well if there is capability/capacity in its implementation (Capacity of Implementability) which is influenced by 2 aspects, namely the Policy Content Aspect (Content of Policy) and Implementation Environmental Aspects (Context of Implementation).

Research approach Implementation of research and assessment policies using a qualitative research design approach, and the research method used is descriptive method, this method is used because it can help illustrate how the implementation of research and assessment policies at the Research and Development Agency. Data collection is done by interview, observation and document review.

The implementation of research and assessment determined by the Ministry of Home Affairs Research and Development through regulations in the form of Permendagri 17/2016 can basically accommodate all research and study activities, both the basis for determining the title of a research and study as well as up to the preparation and final reporting of the results of research activities and the study. But over time or it can be said in terms of implementation, there are shortcomings or inaccuracies in the basis of policies or rules that are considered by the stakeholders to be difficult for these stakeholders in their implementation.

The achievement of the implementation of research and assessment policies as an administrative process can be described and explained comprehensively through the subaspects included in the Content of Policy related to the implementation of research and studies conducted by the Ministry of Home Affairs Research and Development Agency which leads to a positive direction.

The achievement of the implementation of research and assessment policies as a political process can be described and explained comprehensively through sub-aspects included in the Context of Implementation carried out by the Ministry of Home Affairs Research and Development Agency which leads to a negative direction.

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv

BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	13
1. Kebijakan	15
2. Implementasi Kebijakan	29
3. Telaah Kebijakan	46
B. Penelitian Terdahulu	48
C. Konsep Kunci.....	49
D. Model Berfikir.....	54
E. Pertanyaan Penelitian	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	57
B. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Pengumpulan Data	59
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
C. Instrumen Penelitian.....	62
D. Prosedur Pengolahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Uraian Data Hasil Penelitian.....	66
B. Analisis Data.....	71

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Rekap Jurnal

Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Peringkat Kegiatan Litbang di Dunia Tahun 1996-2018
- Gambar 1.2 : Peringkat Kegiatan Litbang di Asia Tahun 1996-2018
- Gambar 1.3 : Data Sistem Kepegawaian Badan Litbang Tahun 2019
- Gambar 1.4 : Data Pagu Anggaran Badan Litbang Tahun 2015-2018
- Gambar 1.5 : Sistem aplikasi e-Kelitbang
- Gambar 2.1 : *Agenda Setting Process* (Handoyo, E., Kebijakan Publik., 2012)
- Gambar 2.2 : *Kaitan Isu, Problem dan Kebijakan* (Handoyo, E., Kebijakan Publik., 2012)
- Gambar 2.3 : *Aspek yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan* (Grindle, 1980)
- Gambar 3.1 : Proses Triangulasi
- Gambar 3.2 : Proses Alir Pengolahan Data
- Gambar 4.1 : Peta Lokasi Badan Litbang Kemendagri
- Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Litbang Kemendagri

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Foto Wawancara
2. Lampiran Panduan Wawancara
3. Transkrip Wawancara
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Politeknik STIA-LAN Jakarta
5. Surat Pemberitahuan Izin Melaksanakan Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup

**POLITEKNIK
STIA-LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengaruh globalisasi membawa perubahan dan reformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan tersebut membawa dampak pada arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Kebijakan pembangunan sangat didukung oleh peran perumus kebijakan yang menghasilkan produk kebijakan yang mendukung program pembangunan yang saat ini menjadi program prioritas di Indonesia.

Perumusan kebijakan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis dan kajian yang dilakukan sepenuhnya oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang membantu dalam perumusan kebijakan pembangunan dimaksud. Kebijakan pembangunan yang dihasilkan melalui penelitian dan kajian yang dilakukan adalah suatu hal yang sangat ideal dalam penerapannya. Secara faktual dapat dikatakan menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkret dan konsisten. Dalam konteks permasalahan dimaksud, tentunya tidak terlepas dari pengaruh dinamika akibat adanya perubahan atau terbukanya fenomena cara pandang di kalangan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari kebijakan. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah

pemerintahan. Kebijakan yang dipilih pemerintah harus mampu membawa perubahan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan mutu pelayanan publik, serta terlaksananya pembangunan. Hal tersebut bermakna bahwa kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Namun demikian, Nugroho dalam Pasolong (2011:41) mengatakan tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi malah menciptakan masalah baru. Namun demikian Nugroho dalam Pasolong (2011:41) mengatakan tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi malah menciptakan masalah baru.

Atas pertimbangan dimaksud, Pemerintah seyogianya mampu menjadi fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah, sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup masyarakat secara luas. Ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi payung dan tuntunan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah saat ini. Disinilah dukungan jejaring atau stakeholders pemerintahan sangat diperlukan dalam mengembangkan posisi strategis tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik dalam lingkungan institusi pemerintahan itu sendiri maupun non-pemerintah.

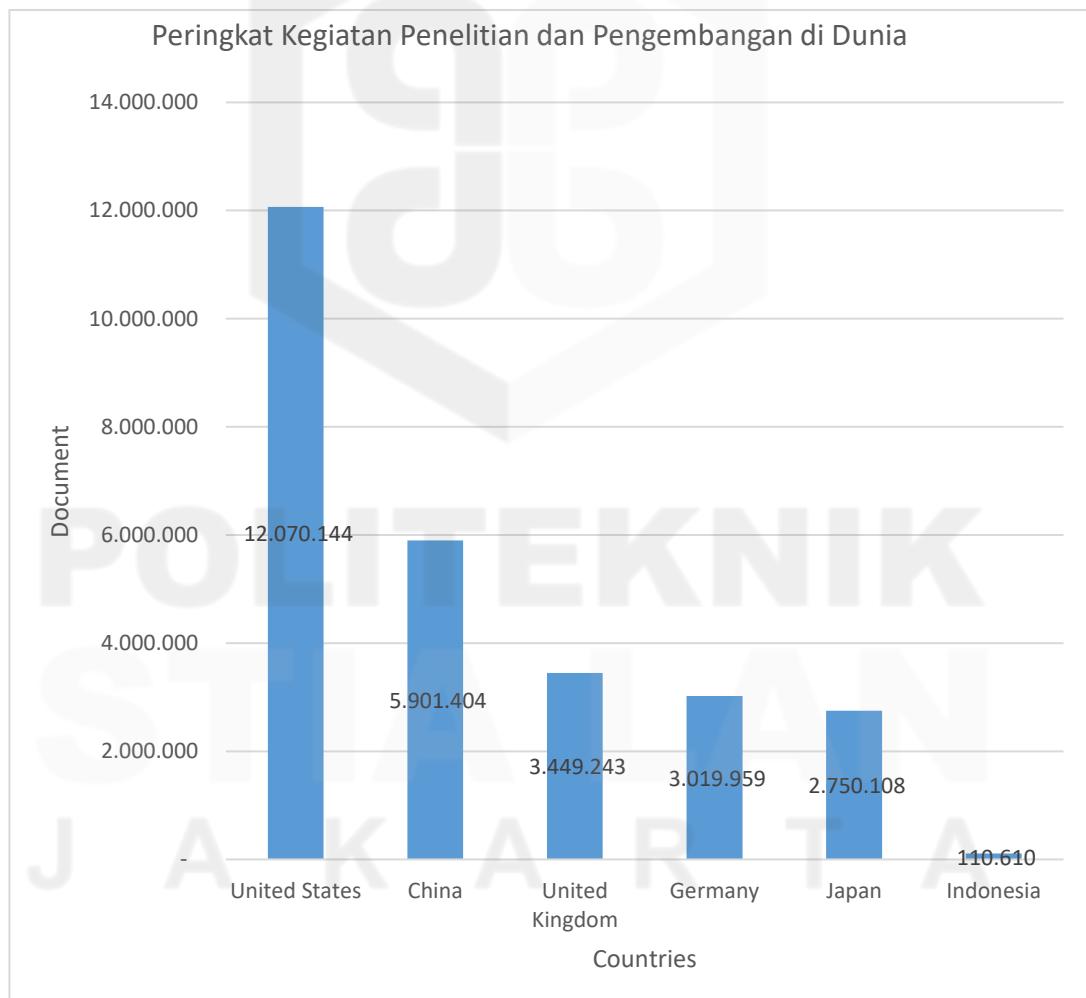
Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan harus berkualitas, dalam menghasilkan kebijakan berkualitas dimaksud harus didukung data yang valid, informasi

yang faktual, dan direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Masalahnya, tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah bahkan malah menciptakan masalah baru. Dari itu disadari suatu tahap penting dari kebijakan adalah perumusannya. Dalam proses perumusan kebijakan, diperlukan dukungan pengetahuan seputar kebijakan sebagai bahan pertimbangan, salah satunya melalui hasil penelitian dan pengembangan. Atas dasar inilah peran pentingnya institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.

Penelitian dan pengembangan sangat penting dalam perkembangan kehidupan dan peradaban. Melalui penelitian dan pengembangan, berbagai pengetahuan baru bermunculan, rentetan teknologi baru terus dikembangkan. Berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi umat manusia amat mungkin ditemukan jawabannya melalui penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan di Indonesia masih menjadi hal yang dianggap penting, baik sistem pendanaan yang belum mendukung penuh, skema penelitian dan pengembangan dengan sistem sekarang lebih mengutamakan capaian administratif ketimbang substansi, pusat penelitian dan pengembangan yang ada di lembaga pemerintah dan perguruan tinggi yang belum mendukung.

Dalam kurun waktu tahun 1996-2018, SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS memberikan peringkat kegiatan penelitian dan pengembangan kepada seluruh dunia yang menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Sebagaimana dimaksud pada gambar grafik 1.1 di bawah ini:

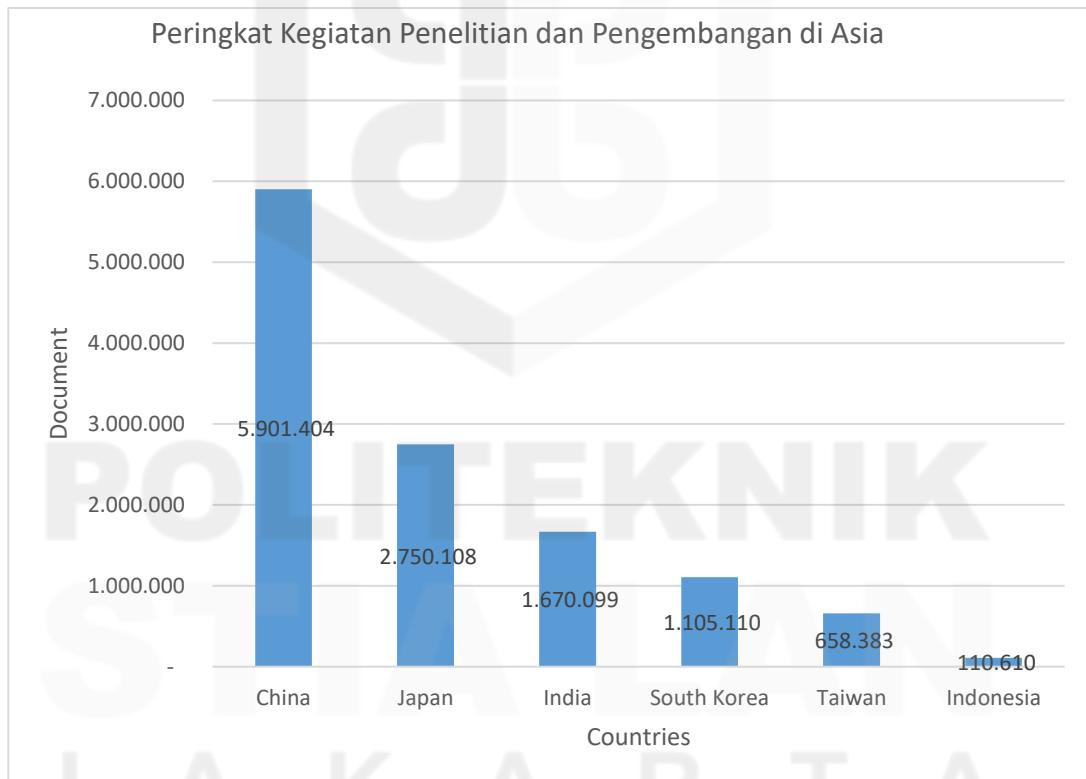


Gambar 1.1 : Peringkat Kegiatan Litbang di Dunia Tahun 1996-2018

sumber : <https://www.scimagojr.com/countryrank.php> yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 10.36 WIB

Dari Gambar 1.1 menunjukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh negara Indonesia menduduki peringkat ke 48 dari 239 negara dalam kawasan dunia.

Gambar 1.2



Gambar 1.1 : Peringkat Kegiatan Litbang di Asia Tahun 1996-2018

sumber : <https://www.scimagojr.com/countryrank.php> yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 10.37 WIB

Dari grafik 1.2 menunjukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh negara Indonesia menduduki peringkat ke 11 dari 33 negara dalam kawasan Asia, masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

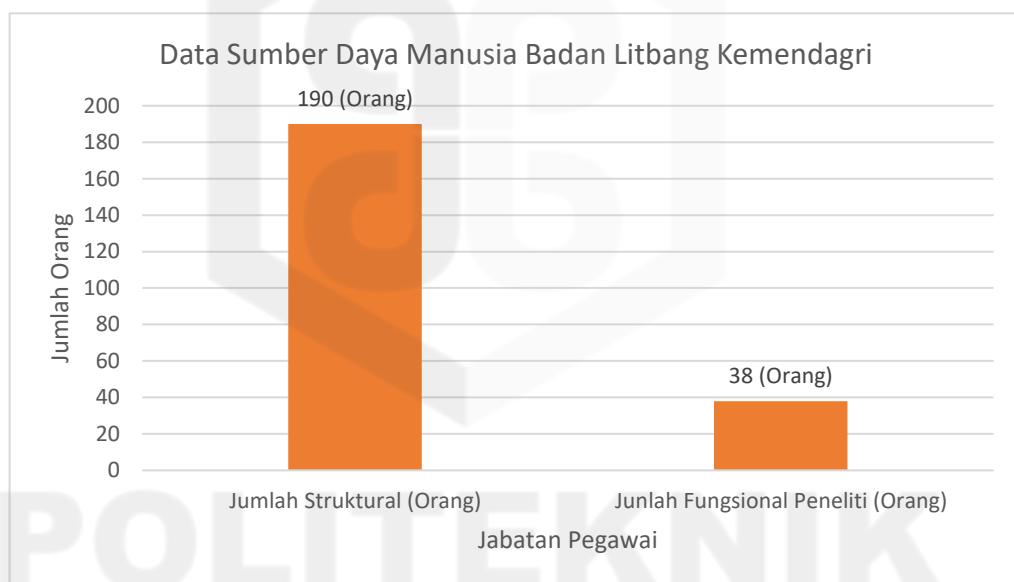
Di lingkup Kementerian Dalam Negeri Pelaksanaannya dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2018 bahkan hingga sekarang, dalam perjalannya beberapa kali perubahan kebijakan yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari kebijakan pertama yang diakomodir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 dan didukung kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014, hingga akhirnya pada tahun 2016 diterbitkan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 yang mensimplifikasi ketiga peraturan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai sumber daya manusia sebanyak 228 Orang yang terdiri dari 190 orang pejabat struktural dan pelaksana serta 38 orang fungsional peneliti, hal ini menjadi sangat ironis yang harusnya suatu lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan yang idealnya harus lebih banyak fungsional penelitiya. Tetapi dalam kenyataan jumlah strukturalnya yang melebihi fungsional

penelitiya. Dalam suatu lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan yang harusnya memiliki porsi perbandingan 2 fungsional : 1 struktural. Sebagaimana digambarkan pada grafik 1.3 dibawah ini:

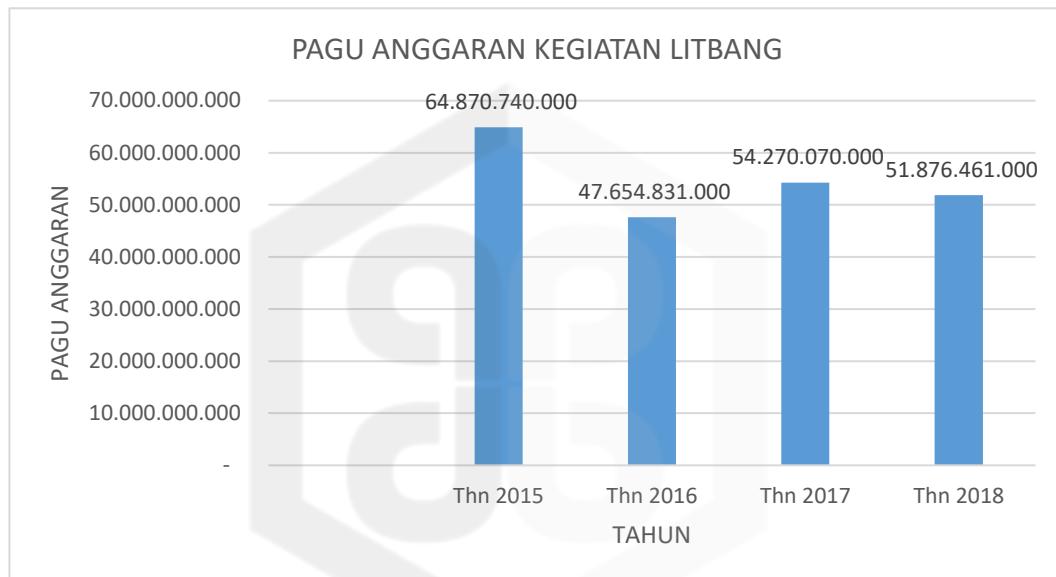
Gambar 1.3



sumber : data sistem kepegawaian Badan Litbang Kemendagri Tahun 2019

Begitupun dalam halnya sisi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu Tahun 2015 - 2018 pagu anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan lebih cenderung turun, seperti digambarkan pada grafik 1.4 dibawah ini:

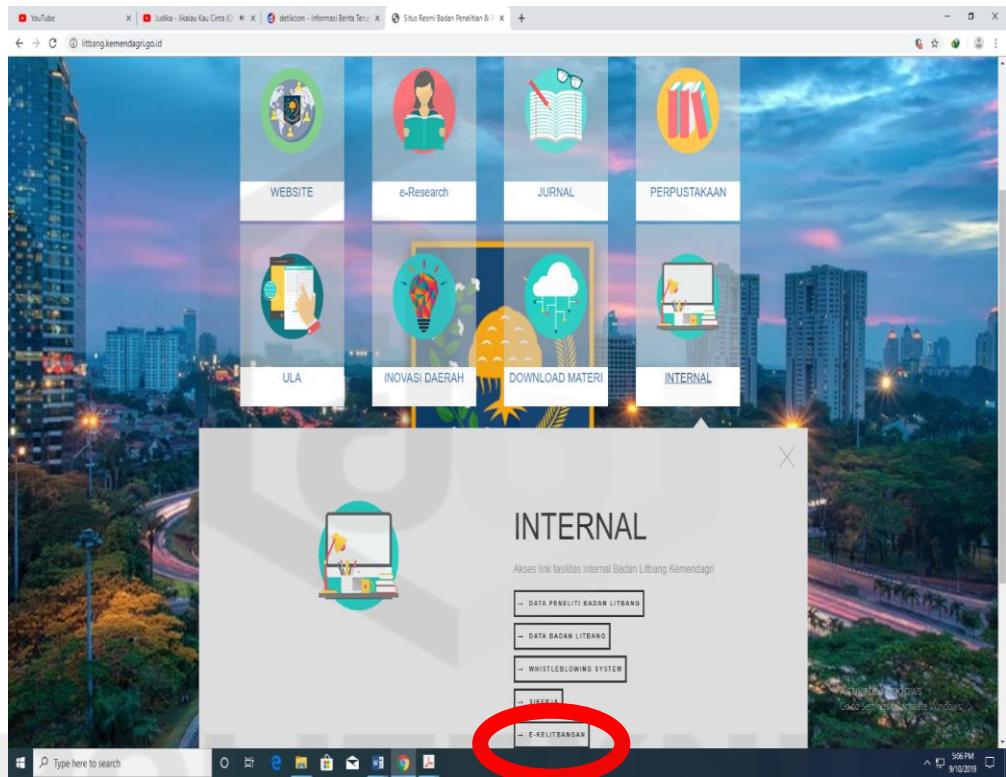
Gambar 1.4



sumber : data LAKIP Badan Litbang Tahun 2015-2018

Dari awal penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 telah dirancang aplikasi untuk memudahkan pengguna kegiatan penelitian dan pengembangan dalam melewati prosedur kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud. Aplikasi e-kelitbang seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah segala kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai saat ini tidak berjalan dengan yang diharapkan, ini terjadi karena tidak konsistennya pusat litbang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang menggunakan/mengaplikasikan e-kelitbang. seperti digambarkan pada gambar 1.5

Gambar 1.5



sumber : <https://litbang.kemendagri.go.id/> yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 10.37 WIB

Selama berjalannya implementasi kebijakan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2016 belum sampai dengan penerbitan jurnal ilmiah seperti yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Dari tabel yang di dapat oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan litbang hanya menyelesaikan sampai tahap ringkasan eksekutif dan dokumentasi perpustakaan (laporan akhir). Tetapi dari jurnal yang diterbitkan oleh Badan Litbang Kemendagri selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak ada satupun judul yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengkajian yang diterbitkan sebagai jurnal ilmiah, yang seharusnya hingga

output ini pihak pelaksana melakukan hal tersebut. Seperti disajikan dalam Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Tahun	Jurnal yang Terbit	Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif
2016	14 Jurnal	25 Laporan
2017	46 Jurnal	27 Laporan
2018	46 Jurnal	27 Laporan
2019	32 Jurnal	32 Laporan

Sumber : Data Badan Litbang (diolah)

Ini menjadi sangat miris karena yang harusnya lembaga fungsional yang berjalan di fungsi penelitian dan pengembangan tetapi tugas dan fungsi tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, ini berbanding terbalik dengan tugas dan fungsi litbang menjadi hal yang sangat penting untuk di prioritaskan terutama dalam mengkaji bahkan sampai menerapkan rancangan kebijakan yang akan diterapkan pada kedepannya. Sehingga lembaga penelitian dan pengembangan menjadi lembaga yang strategis khususnya bagi kebijakan yang akan dilahirkan/dihasilkan.

Berdasarkan pengamatan sementara, peneliti melihat bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 belum bisa mendorong jalannya kegiatan litbang di lingkup Pusat Litbang Badan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti aspek dan sub aspek khususnya dalam bidang penelitian dan pengkajian saja yang perlu difokuskan dalam rangka memperbaiki strategi/cara Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam pembinaan penelitian dan pengkajian guna mendorong tumbuhkembangnya litbang melalui

implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang sesuai diterapkan di Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

Bagaimana implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang diterapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek dan subaspek implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu diterapkan oleh Badan Litbang Kemendagri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian yang mendukung tugas dan fungsi dari Badan Litbang Kemendagri.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Manfaat penelitian terhadap kepentingan akademik adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi negara konsentrasi manajemen kebijakan pembangunan khususnya aspek dan subaspek implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu diterapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam

pembinaan litbang guna mendorong efektifnya penelitian dan pengembangan pada pusat litbang Kementerian Dalam Negeri.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi bagi para pengambil kebijakan dan analis kebijakan mengenai aspek dan subaspek kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu diterapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam pembinaan litbang guna mendorong efektifnya penelitian dan pengembangan pada pusat litbang Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi penelitian dan pengkajian yang ditetapkan oleh Badan Litbang Kemendagri melalui regulasi yang berbentuk Permendagri 17/2016 pada dasarnya sudah mengakomodir dasar dan tahapan seluruh kegiatan dimaksud, baik dasar penentuan judul dari suatu penelitian dan pengkajian serta sampai dengan penyusunan dan pelaporan akhir dari hasil kegiatan penelitian dan pengkajian tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu atau bisa dikatakan dalam segi implementasi, terdapat kekurangan atau ketidaktepatan dasar kebijakan atau aturan yang dianggap para stakeholder justru menyusahkan para stakeholder tersebut dalam pengimplemtasiannya.

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian tersebut merupakan proses administrasi dan proses politik yang dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*) serta strategi implementasi kebijakan berdasarkan kedua aspek tersebut yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri yaitu:

a. Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian tersebut sebagai proses administrasi dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*) terkait implementasi penelitian dan pengkajian yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang positif (baik), lebih detail dan rinci lagi bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Aspek Kepentingan Kelompok Sasaran

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif sesuai pedoman penelitian dan pengkajian yang diterbitkan melalui Permendagri 17/2016 telah mengakomodir pelaksana yaitu pusat litbang sebagai pelaksana kegiatan, dengan tahapan dan mekanisme yang disajikan dalam bentuk aturan hukum menjadikan pelaksana melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian khususnya pengkajian aktual agar maksimal dan bermanfaat bagi Badan Litbang khususnya dan pusat litbang pada umumnya. Melewati melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan hingga proses akhir yang mempunyai hasil akhir berupa output laporan yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2) Sub Aspek Derajat Perubahan yang diinginkan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif dimana dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai

apabila pemerintah menyadari akan pentingnya penelitian dan pengkajian dalam setiap perumusan suatu kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan oleh stakeholder terhadap pedoman penelitian dan pengkajian ini adalah hasil yang ditetapkan dengan berpedoman pada penelitian dan pengkajian ini bisa digunakan oleh para stakeholder tersebut. Misalnya terbentuknya indeks inovasi daerah dengan indikator yang lebih tepat.

3) Sub Aspek Letak Pengambilan Keputusan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif karena pengambilan keputusan lebih ke arah otoriter. Seperti kita ketahui struktur birokrasi pemerintahan di Indonesia masih bersifat dan berjenjang, sehingga peran dari bawah, menengah hingga pimpinan tertinggi menjadi sangat sentral.

4) Sub Aspek Pelaksana Program

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif, karena pelaku penelitian dan pengkajian sepenuhnya menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan hukum/pedoman yang diterbitkan. Sampai pada tingkat bawah yaitu pelaksana agar paham akan tahap-tahap penelitian dan pengkajian sesuai Permendagri 17/2016 agar menghasilkan output yang lebih baik dan efektif.

5) Sub Aspek Sumber Daya yang dilibatkan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif, bisa dilihat dari Sumber daya yang dilibatkan merupakan aspek yang

mendukung keberhasilan implementasi dimana penentuan sumber daya yang dilibatkan harus tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan telah ditetapkan hal ini dilakukan karena adanya sumber daya yang langka dan bervariasi di setiap pusat litbang, Namun kurangnya penguatan kompetensi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana serta prasarasananya yang mendukung jalannya penelitian dan pengembangan yang akan berdampak pada komitmen untuk dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian tersebut sehingga dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh masing-masing pusat juga tidak sama. Hal ini dikarenakan ketidaksamaan sumber daya pengelolanya, sumber daya anggaran serta sumber daya pendukung sarana dan prasarana pada tiap pusat litbang berbeda-beda.

b. Aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*)

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian tersebut sebagai proses politik dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang negatif (buruk), lebih detail dan rinci lagi bisa dijelaskan sebagai berikut::

- 1) Sub Aspek Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif, dimana kekuasaan yang berwenang pada saat implementasi kebijakan

penelitian dan pengkajian menjadi dominan dibandingkan dengan kerangka kebijakannya, ini dikaitkan dengan pertimbangan yang akan diimplementasikan terhadap seluruh tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.

2) Sub Aspek Karakteristik lembaga dan penguasa

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif, dengan pertimbangan karakteristik lembaga dan penguasa dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat tertata dengan baik maka diperlukan wadah dimana aktor-aktor yang telah direkrut untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dalam suatu lembaga/organisasi. Oleh sebab itu pemimpin yang berpihak dan mempunyai komitmen yang kuatlah yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian.

3) Sub Aspek Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif, Karena dalam suatu organisasi litbang suatu kepatuhan terhadap kebijakan yang diperuntukan bagi suatu organisasi menjadi sangat penting dalam perjalanan suatu organisasi, sehingga respon dari pelaksana menjadi kebutuhan yang sangat dilakukan. Contohnya kebijakan penelitian dan pengkajian yang dilakukan sesuai dengan prosedur maka outputnya juga bisa dikatakan baik dan bermanfaat.

B. Saran

Adapun saran dan masukan agar implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri supaya bisa maksimal dan efektif dalam aspek dan subaspek meliputi:

a. Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dalam aspek isi kebijakan tidak semuanya bisa diberikan dalam masukan dan saran kerena ada beberapa yang sudah mengarah ke arah perubahan yang positif, peneliti hanya memfokuskan pada sub aspek letak pengambilan keputusan karena hal ini dianggap penting dan strategis untuk peneliti berikan masukan, sebagai berikut:

Letak Pengambilan Keputusan

Sangat perlu dibentuknya Tim ahli independen yang berkedudukan sebagai katalisator segala kegiatan penelitian dan pengkajian. Hal ini bermaksud juga agar mengurangi intervensi dari pimpinan tinggi yang belum tentu tepat pengambilan kebijakannya, dengan dibentuknya Tim ahli ini juga diharapkan kualitas kegiatan penelitian dan pengkajian menjadi lebih optimal dan bermanfaat khususnya bagi Menteri Dalam Negeri sebagai penerima langsung manfaat tersebut.

b. Aspek Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Dalam aspek lingkungan implementasi tidak semuanya bisa diberikan dalam masukan dan saran kerena ada beberapa yang sudah mengarah ke arah perubahan yang positif, peneliti hanya memfokuskan pada sub aspek Karakteristik lembaga dan penguasa serta Sub Aspek Karakteristik

lembaga dan penguasa karena hal ini dianggap penting dan strategis untuk peneliti berikan masukan, sebagai berikut:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Melakukan revisi Permendagri 17/2016 karena peneliti anggap aturan/pedoman ini masih belum sepenuhnya mengakomodir apabila terjadi benturan-benturan antara pelaksana kegiatan penelitian dan pengkajian dengan pimpinan tinggi sebagai pemegang kuasa penuh atas instansi/lembaga. Revisi yang harusnya dilakukan pada mekanisme dan tahapan dalam kegiatan penelitian dan pengkajian.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Melakukan perubahan struktur birokrasi pada Badan Litbang Kemendagri, baik dengan cara mengusulkan percepatan *impassing* pejabat struktural ke fungsional maupun penghapusan pejabat struktural eselon III dan eselon IV serta membuka alokasi PNS dengan status peneliti agar sesuai dengan konsep lembaga fungsional pada umumnya yaitu miskin struktur tetapi kaya fungsionalnya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: an Introduction*. Connecticut, United States of America: Stamford, CT: Cengage Learning.
- Borg and Gall (1989). *Educational Research, An Introduction*. New York and London. Longman Inc.
- Darwin, Muhamad (1997). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction* (Kedua ed.). (M. Darwin, Ed., S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto, Trans.) New Jersey, United States of America: Prentice-Hall, Inc., A Simon & Schuster Company.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall, Inc Englewood Cliffs, NJ.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. (F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Eds.) Tallahassee, Florida, United State of America: CRC Press.
- Gay, L.R. (1991). *Educational Evaluation and Measurement: Competencies for Analysis and Application*. Second edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sebelas Maret dan Widya Karya.
- Islamy, M. I. (1984). *Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Negeri, K. D. (2002). Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Undang-Undang Nomor 18*. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.
- Negeri, K. D. (2015). Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Presiden Nomor 11*. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.
- Negeri, K. D. (2015). Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43*. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy:Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, W. (2011). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of Public Policy*. London, United Kingdom: Sage Publications Ltd.

Plomp, Tj. (1994). *Educational Design: Introduction. From Tjeerd Plomp (eds). Educational & Training System Design: Introduction. Design of Education and Training (in Dutch)*. Utrecht (the Netherlands): Lemma. Netherland. Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente.

Pusat Bahasa Indonesia, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rita C. Richey, J. D. K., Wayne A. Nelson. (2009). *Developmental Research: Studies of Instructional Design and Development*.

Rusli, H. B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. (N. M. Wiganda, Ed.) Bandung: Hakim Publishing.

Seels, Barbara B. & Richey, Rita C. (1994). *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.

Setiawan, I. (2014). *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Suharto, Edi. (2006). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

Van den Akker J. (1999). *Principles and Methods of Development Research. Pada J. van den Akker, R. Branch, K. Gustafson, Nieven, dan T. Plomp (eds), Design Approaches and Tools in Education and Training (pp. 1-14)*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT.Bumi Aksara.

Ward, SC. C Bagley, J Lumby, T Hamilton, P Woods and A Roberts (2016). *What is 'policy' and what is 'policy response'? An illustrative study of the implementation of the leadership standards for social justice in Scotland (pp. 43-56)*. Sage: emal.sagepub.com

Peraturan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Internet

<https://www.scimagojr.com/countryrank.php> yang diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 10.36 WIB

<http://lipi.go.id/lipimedia/anggaran-riset-indonesia-terendah-di-asia-tenggara/16281> yang diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 Pkl. 18.30 WIB